

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN
FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/ TIDAK	KETERANGAN
1.	SURAT PERMOHONAN (FORMULIR) Permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan, cap perusahaan dan bermeterai cukup (<i>permohonan diketik dan bukan tulisan tangan</i>)		
2.	SURAT KUASA DARI DIREKSI PERUSAHAAN Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan, wajib melampirkan : a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang ditandatangani direksi perusahaan dan cap perusahaan, dan b. serta identitas pemberi dan penerima kuasa (<i>surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan</i>)		
3.	Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya (<i>wajib telah diunggah dalam folder perusahaan</i>)		
4.	NPWP Perusahaan (<i>wajib telah diunggah dalam folder perusahaan</i>)		
5.	Akta dan perubahannya serta pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang terdiri dari: * Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPT (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada) * Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada) * Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) * Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) * Akta direksi terakhir (jika ada) (<i>wajib telah diunggah dalam folder perusahaan</i>)		
6.	Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya		
7.	Asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia		
8.	Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak		
9.	Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya		
10.	Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal		

Tanda Tangan Direksi/Pimpinan Perusahaan/Kuasa Perusahaan

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN/*TAX HOLIDAY*
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010
DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015

I. KETERANGAN PEMOHON

1.

Nama perusahaan

:
2.

Bidang usaha

:
- Nomor dan tanggal

Izin Prinsip/Izin Investasi serta

perubahannya

:
4.

Instansi yang menerbitkan

:
5.

NPWP

:
6.

Nomor dan Tanggal Akta

Pendirian dan perubahannya

:
7.

Nomor dan Tanggal pengesahan

Badan Hukum

:
8.

Alamat Kantor Pusat

:

3.

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1.

Estimasi Mulai berproduksi

:

(bulan/tahun)
2.

Investasi proyek (Rp/US\$)*

:

(nilai investasi modal tetap)
3.

Modal perseroan (Rp/US\$)*

:

a.
- Modal Dasar

:
- b.

Modal Ditempatkan

:
- c.

Modal Disetor

:
- *) pilih salah satu
4.

Tenaga Kerja Indonesia

:

orang

(tenaga kerja tetap)
5.

Pemasaran ekspor

:

%
6.

Tingkat Komponen Dalam

Negeri (Produk)

:

%

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : , dalam kapasitas saya sebagai Direktur Perusahaan PT. dengan ini menyatakan :

1.

Bahwa dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan menyatakan akan selalu mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

a.

keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b.

kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan

c.

keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,,
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

Catatan :
penandatanganan permohonan adalah direksi perusahaan.

LAMPIRAN :

Seluruh persyaratan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* sebagaimana dimaksud pada Lampiran I

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN/TAX HOLIDAY

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Perusahaan	Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
2	Bidang Usaha	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
4	Instansi Yang Mengeluarkan	Diisi sesuai instansi yang menerbitkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya
5	NPWP	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
8	Alamat Kantor Pusat	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
9	Rencana Penanaman Modal	- Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - KBLI diisi sesuai dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Cakupan Produk diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Daerah/Lokasi diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
10	Estimasi Mulai Berproduksi Komersial (bulan/tahun)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan mulai berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./US\$)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
12	Modal Perseroan	- Modal Dasar diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Modal Ditempatkan diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday. - Modal Disetor diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
13	Tenaga Kerja Indonesia	Diisi sesuai dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.
14	Pemasaran ekspor	Diisi sesuai dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya untuk diajukan permohonan usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Berita Acara Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi
Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*

BERITA ACARA

Hari/Tanggal	:	
Tempat	:	
Perihal	:	Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan/Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan Pembahasan Permohonan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/ <i>Tax Holiday</i> PT.*)
Hasil Rapat	:	

Menyetujui melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi No. Tanggal ... serta perubahannya No. Tanggal ..., pada bidang usaha, dengan catatan sebagai berikut :
.....

atau

Menolak melanjutkan pembahasan ke Rapat Klarifikasi Teknis/Rapat Pengambilan Keputusan *) usulan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 atas nama PT berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi No. Tanggal ... serta perubahannya No. Tanggal ..., pada bidang usaha, dengan catatan perbaikan/alasan penolakan, sebagai berikut:
.....

Peserta Rapat :

No.	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Pejabat dari Kedeputan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM	
2.	Pejabat dari Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak	
3.	Pejabat dari Direktorat Teknis Pembina Sektor	
4.	Pejabat Kementerian Keuangan (selain Direktorat Jenderal Pajak)	
5.	Tenaga Ahli	
6.	Akademisi	
7.	Asosiasi	

*) *Pilih salah satu*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
Tax Holiday

KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas pengurangan
Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday*
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 159/PMK.010/2015

Jakarta,

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan PT nomor tanggal perihal
permohonan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* dan menindaklanjuti
hasil Rapat Pengambilan Keputusan pada tanggal, dengan ini kami mengusulkan:

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) : (Lokasi Usaha)/
..... (Lokasi Proyek)

No	Produk	KBLI	Keterangan

- 4. Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya :
(*nomor dan tanggal*)
- 5. NPWP :
- 6. Alamat Kantor Pusat :7.
- Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 mengingat bidang usaha PT. memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

- 1. Tanda terima berkas permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/*Tax Holiday* berdasarkan Rapat Klarifikasi Pemenuhan Persyaratan tanggal
- 2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3. Rekaman Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Izin Prinsip serta perubahannya yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
- 4. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 5. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang kajian pemenuhan kriteria industri pionir beserta kajiannya;
- 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia;
- 7. Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- 8. Surat penjelasan bermeterai cukup tentang sumber pembiayaan investasi perusahaan beserta dokumen pendukungnya;
- 9. Surat penjelasan pemenuhan ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Menteri Teknis Terkait;
- 2. Pejabat Eselon I, BKPM;
- 3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
- 4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS
PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan/Tax Holiday

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan atas permohonan usulan fasilitas
pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax
Holiday berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 a.n. PT.
.....

Jakarta,

Yth. Direksi PT.
Alamat kantor pusat perusahaan

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Usulan Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan/Tax Holiday atas Izin Prinsip/Izin Investasi No. Tanggal, serta perubahannya No.
.....Tanggal, yang telah dibahas pada rapat klarifikasi tanggal, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :

- Perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 a.n. PT. atas bidang usaha
sebagai berikut :

1) Bidang Usaha :

2) KBLI :

3) Cakupan Produk :

4) Daerah :
 - Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat klarifikasi pada tanggal ... antara BKPM, Kementerian Keuangan,
kementerian teknis, tenaga ahli, akademisi dan asosiasi dapat kami sampaikan bahwa permohonan untuk
mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Holiday tidak dapat diproses lebih lanjut,
terlampir Berita Acara Rapat Klarifikasi.
 - Selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.
- Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

- Tembusan Yth. :
- Menteri Keuangan;
 - Menteri Teknis Terkait;
 - Pejabat Eselon I BKPM;
 - Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI